

Analisis Pendapatan dan Belanja Menggunakan Aspek *Value for Money*

Barbara Gunawan^{1*}, Alifia Putriantoro²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the realization of the revenue and expenditure budget of the Tourism Office of Sleman Regency by taking into account the level of economy, efficiency, and effectiveness of the allocation of funds to assess the budget. The object of this research is the Tourism Office of Sleman Regency which is located at Jl. KRT. Pringgodingrat, Tridadi, Sleman, Yogyakarta with the main data source being the 2019 Budget Realization Report. This study uses a quantitative descriptive method with primary and secondary data types. This type of primary data was obtained through an interview process with the Finance, Planning and Evaluation Section of the Tourism Office of Sleman Regency. While secondary data comes from information that has been uploaded on the official website of the Sleman Regency Tourism Office. Data analysis uses Value For Money indicators, namely to determine the level of economy, efficiency, and effectiveness. The results of the calculation analysis for each level indicate that the revenue budget is included in the effective criteria. Meanwhile, the expenditure budget shows that it is quite economical and overall the Budget Realization Report shows very efficient results. The implication of this research is that in the future the Tourism Office of Sleman Regency will pay more attention to market prices and strategic plans in preparing the budget so that the difference between spending and income is not too large and detailing the elements of the two categories.

Keywords: *Effectiveness; efficiency; economical; value for money.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dengan memperhatikan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas alokasi dana untuk menilai anggaran. Objek penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. KRT. Pringgodingrat, Tridadi, Sleman, Yogyakarta dengan sumber data utama Laporan Realisasi Anggaran 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder berasal dari informasi yang telah diunggah pada website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Analisis data menggunakan indikator *Value For Money* yaitu untuk mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil analisis perhitungan setiap level menunjukkan bahwa anggaran pendapatan termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan anggaran belanja menunjukkan cukup ekonomis dan secara keseluruhan Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan hasil yang sangat efisien. Implikasi penelitian ini agar kedepannya Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman lebih memperhatikan lagi harga pasar dan renstra dalam penyusunan anggaran sehingga selisih belanja dan pendapatan tidak terlalu besar serta memperinci unsur dari kedua katagori tersebut.

Kata kunci: Efektivitas; efisiensi; ekonomis; *value for money.*

Corresponding author: barbaragunawan@yahoo.co.id

How to cite this article: Gunawan, B., & Putriantoro, A. (2022). Analisis Pendapatan dan Belanja Menggunakan Aspek Value for Money. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 17(1). Retrieved from <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/neracakeuangan>

History of Article: Received: September 2021. Revision: December 2021. Published: March 2022.

DOI Prefix 10.32832/neraca.v17i

PENDAHULUAN

Setiap organisasi yang memiliki tujuan tertentu umumnya akan berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangannya atau *financial performance*. Selanjutnya, karena era globalisasi dan perubahan dunia digital, industri ekonomi menjadi semakin kompetitif. Keberhasilan setelah melakukan usaha sesuai dengan target pencapaian digambarkan oleh kinerja laporan keuangan. Definisi kinerja keuangan adalah kegiatan analitis yang bertujuan untuk menentukan seberapa baik suatu korporasi mematuhi persyaratan penegakan keuangan (Fahmi, 2012). Untuk dapat menyusun

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja, dibutuhkan sumber daya tenaga berkemampuan dalam menganalisis kinerja kegiatan. Hal itu berorientasi agar pengelolaan anggaran dapat berjalan secara ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat (Rumiasih dan Ikmayadi, 2012). Kinerja suatu industri dapat ditingkatkan karena berbagai alasan, termasuk persaingan yang ketat. Beberapa negara saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama pandemi yang disebabkan oleh virus corona, yang juga dikenal sebagai COVID-19. Banyak industri sangat terganggu oleh pandemi, termasuk pariwisata. Di sektor pariwisata, dampak yang terlihat adalah penurunan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. (Sleman, 2019).

Sleman merupakan salah satu daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan kontribusi signifikan terhadap potensi sektor bisnis, dengan berbagai destinasi wisata antara lain wisata pedesaan, wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner, serta keberadaan beberapa hotel dan restoran (Sleman, 2020). Kontribusi provinsi DIY terhadap nilai PDRB tidak berubah berdasarkan perkiraan rata-rata PDRB 2019-2020. Kabupaten Sleman seperti tahun-tahun sebelumnya memiliki nilai kontribusi PDRB terbesar, disusul Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan terakhir Kabupaten Kulon Progo (DIY, 2019). Perluasan dan pemanfaatan pariwisata diproyeksikan dapat memanfaatkan sumber daya yang berpengaruh pada PDRB dalam meningkatkan perekonomian (Suyitno, 2012).

Karena memiliki peluang yang cukup besar untuk menarik wisatawan, Kabupaten Sleman menggunakan strategi yang adaptif. Di daerah pedesaan atau di jantung Kabupaten Sleman, sejumlah pilihan wisata baru bermunculan, menawarkan konsep modern hingga besar. Kabupaten Sleman harus sangat cermat dan sistematis dalam menetapkan anggaran sektor pariwisata melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman karena merupakan daerah dengan potensi yang luar biasa. Sesuai dengan tanggung jawab pemerintah, anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan secara berkala dipamerkan kepada publik melalui media untuk merangkum hasil kinerja yang dicapai selama periode waktu tertentu. Publik harus lebih memperhatikan media informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, mengingat perkembangan media yang begitu pesat.

Laporan Pencapaian Anggaran yang memuat perencanaan dan pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian. APBD, menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan diatur dengan undang-undang daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebagai entitas sektor publik harus memberikan contoh pengelolaan anggaran yang mencakup tanggung jawab, keterbukaan, kredibilitas, dan stabilitas ekonomi. Dalam hal berkontribusi pada upaya pemerintah untuk membangun akuntabilitas dan tata kelola yang baik, serta memberikan informasi, akuntansi sektor publik memiliki banyak potensi.

Perasaan saja tidak bisa digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah. Namun, untuk terintegrasi, ia harus memeriksa *input*, *output*, dan *outcome* secara bersamaan (Purwiyanti, 2017). Penentuan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dapat ditentukan melalui pertimbangan *input*, *output*, dan *outcome*. Ekonomis merupakan hal penting yang sangat diperhatikan dengan penghematan anggaran untuk mendapatkan investasi dengan melakukan rencana, kegiatan dan operasional tanpa membuang anggaran (Mahmudi, 2016). Pengukuran tingkat ekonomi dengan membandingkan pencapaian anggaran belanja dengan target anggaran. Apabila ekonomi lebih memperhatikan input, maka efisiensi bisa berkaitan dengan porsi output atau proses, dan efektivitas berkaitan dengan hasil. Besarnya efektivitas ditentukan dengan membandingkan pencapaian anggaran pendapatan dengan target anggaran (Mahmudi, 2016).

Sedangkan efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang sebaik mungkin antara masukan (*input*) terhadap keluaran (*output*) (hasil antara keuntungan dan sumber yang digunakan). Indikator penting untuk mengukur ketiga persentase tersebut adalah *Value for Money*, yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja entitas sektor publik pada agenda yang dimaksud (Mahmudi, 2015). Akuntabilitas yakni suatu laporan keuangan instansi pemerintah sangat penting karena dapat dikatakan berperan sebagai media akuntabilitas, yang memberikan informasi yang transparan dan

akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sundarta dan Rosita, 2013).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019 menggunakan *Value For Money*. Secara teoritis, penelitian ini memiliki harapan agar mampu digunakan sebagai acuan pengetahuan terkait tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan salah satu hasil praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi prestasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menganalisis pencapaian dan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik jika disusun dalam beberapa sudut pandang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Hal ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja entitas sektor publik dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dari sisi pemerintah, studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memantau efektivitas alokasi anggaran, yang akan berguna untuk pembuatan kebijakan di masa depan.

Sayuti et al., (2018) menyatakan bahwa, konsep *Value For Money* cukup ekonomis, efisien dan efektif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perwujudan nilai transparansi sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik. Ridwan dan Anggrawati, (2017) menyatakan bahwa pada program pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi prinsip ekonomi. Nilai efisiensi dari program tersebut juga terbukti bahwa anggaran yang digunakan sangat efisien, sedangkan nilai efektivitas dari program pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur tidak efektif. Pratama et al., (2018) menyatakan bahwa pelatihan dan tekanan eksternal dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada keefektifan penerapan dana berdasar kinerja. Akan tetapi, untuk absorpsi anggaran, hanya pemahaman variabel yang memiliki dampak substansial. Selain itu, efektivitas dana berdasar kinerja juga secara signifikan berdampak baik pada penyerapan dana. Prasetyo dan Nugraheni (2020) menyatakan bahwa Disdukcapil Kota Magelang pada tahun 2015 dan 2016 penyerapan anggaran cukup efektif, tahun 2017 kurang efektif, tahun 2018 dan 2019 efektif. Sedangkan untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran dari periode 2015 – 2019 tidak efisien. Sumenge (2013) menyatakan bahwa Tingkat dan kriteria efektifitas anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Anggaran belanja masih kurang efektif dikarenakan terdapat kegiatan yang dianggarkan, namun tidak terlaksana. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan, sudah dilaksanakan secara efektif.

Perbedaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan variabel. Objek pada penelitian ini ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang terletak di Jl. KRT Pringgodiningrat No. 13, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 dan pembahasan secara menyeluruh mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memilih objek badan perencanaan dan pembangunan daerah ataupun badan keuangan daerah yang lebih membahas mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019 menggunakan *Value For Money*. Secara teoritis, penelitian ini memiliki harapan agar mampu digunakan sebagai acuan pengetahuan terkait tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan salah satu hasil praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi prestasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menganalisis pencapaian dan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik jika disusun dalam beberapa sudut pandang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Hal ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja entitas sektor publik dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dari sisi pemerintah, studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memantau efektivitas alokasi anggaran, yang akan berguna untuk pembuatan kebijakan di masa depan.

Harga pasar yang bersifat kondisional mempengaruhi biaya yang dikeluarkan, maka perlu pertimbangan untuk menentukan besaran target dan realisasi yang akan dicapai. Implikasi dari penelitian ini agar kedepannya Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman lebih memperhatikan lagi harga pasar dan renstra dalam penyusunan anggaran sehingga selisih belanja dan pendapatan tidak terlalu besar serta memperinci unsur dari kedua katagori tersebut. Selain harga pasar yang menjadi pertimbangan, renstra yang menjadi acuan dalam penyusunan harus selalu menjadi pertimbangan. Implikasi dari penelitian ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman lebih peka terhadap detail penjas yang harus tertulis dan terpublikasi dalam media agar masyarakat menjadi jelas terhadap informasi yang telah dibagikan. Penelitian ini sedikit banyak memiliki kontribusi pada teori *value for money*, dimana untuk menghitung *value for money* menggunakan rumusan terpisah. *Value for Money* disini menyangkut mengenai 3 aspek sekaligus, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Jadi, rumusan *value for money* tidak selalu menunjukkan perhitungan yang kompleks pada setiap variabelnya yang berupa persentase output, input, dan input value, namun dapat dengan menghitung melalui nominal anggaran dan realisasinya seperti yang diterapkan pada pengolahan data dalam penelitian ini sehingga menjadi lebih mudah untuk dianalisis dan dipahami oleh publik.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja, yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2011). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rancangan pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang sebelumnya telah dibahas, lalu ditetapkan dengan peraturan daerah (Nasution, 2019).

Berbagai fungsi anggaran antara lain ialah sebagai alat perencanaan, kontrol, kebijakan keuangan, media politik, komunikasi, penilaian kinerja, pendorong, ruang publik. Selain itu, anggaran memiliki beberapa prinsip yakni: demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel (BPKAD, 2018). Anggaran tidak hanya merupakan rencana keuangan yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dan pendapatan perusahaan, tetapi juga alat bagi manajemen puncak untuk mengontrol, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan mengevaluasi kinerja serta memotivasi bawahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suaturancangan pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang sebelumnya telah dibahas, lalu ditetapkan dengan peraturan daerah (Nasution, 2019). Kebijakan anggaran dibagi menjadi pendapatan dan pengeluaran (BPKAD, 2018). Pendapatan daerah merupakan keseluruhan penerimaan sejumlah uang yang akan menambah dana ekuitas melalui rekening kas umum daerah, menjadi hak suatu daerah dalam setahun anggaran tanpa perlu dibayar kembali (Nasution, 2019).

Ekonomis adalah hal yang terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh investasi dengan melaksanakan rencana, kegiatan dan operasional tanpa membuang anggaran. Tingkat ekonomi diukur dengan melihat perbandingan antara pencapaian anggaran belanja dengan target anggaran (Mahmudi, 2016). Dikatakan ekonomis apabila organisasi sektor publik mampu mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, semakin kecil nilai dari rasio ekonomi, maka semakin baik kinerja (Wuwungan et al., 2019) Efektivitas ialah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Ardila dan Putri, 2015). Dengan perkiraan anggaran dana, akan mampu memiliki waktu konstan serta kuantitas orang yang ditetapkan pada tempo sebelumnya. Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* yang besar. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Sari, 2014). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Value For Money adalah sketsa pada organisasi sektor publik yang berarti menghargai nilai uang. Pengukuran kinerja *Value For Money* yakni penilaian kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu agenda yang terlaksana, rencana, dan terorganisir (Mahmudi, 2015). Dikatakan ekonomis apabila organisasi sektor publik mampu mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, semakin kecil nilai dari rasio ekonomi, maka semakin baik kinerja (Wuwungan et al., 2019). Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang

terendah untuk mencapai *output* yang besar. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Sari, 2014). Efektivitas ialah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Ardila dan Putri, 2015). Manfaat Pengukuran dengan Indikator *Value For Money*: meningkatkan efektivitas dan mutu pemberian jasa, mengurangi *cost* pelayanan, alokasi belanja berdasarkan kepentingan masyarakat umum, meningkatkan kesadaran masyarakat perihal penggunaan dana publik (Renyowijoyo, 2012).

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Proses analisis berdasarkan studi literatur dan dokumentasi. Menekankan fokus pada simpulan informasi utama yang diperoleh. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan informasi realisasi anggaran yang telah dianggarkan pada tahun 2019. Melakukan analisis pengukuran kinerja terpaku pada tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dengan rumusan :

Tingkat ekonomis menurut Mahmudi (dalam Rahmawati, 2019) adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus menghitung tingkat efisiensi PAD (Mahmudi, 2019) adalah:

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Rumus tingkat efektivitas Mahmudi (dalam Ramadhan, 2017) adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Setelah diketahui tingkat ketiga aspek tersebut, maka dapat dinilai pada titik mana Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dalam mengelola anggaran untuk hasil kinerja yang baik untuk pencapaian tujuan. Metode penelitian ini menggunakan 3 metode, yakni wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan yang dibahas serta berhubungan dengan data yang diperlukan penulis (Daling, 2013). Dalam metode ini, informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yakni sub bagian Keuangan dan Evaluasi.

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Nainu *et al.*, 2017). Dalam hal ini penulis mengambil dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 melalui *website* resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yakni pariwisata.slemankab.go.id Sedangkan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan daerah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian (Septariani, 2018). Peneliti mencari dan mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti. Informasi didapat dari berbagai dokumen tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, surat kabar atau melalui internet untuk menunjang penelitian.

Anggaran pendapatan dan belanja serta realisasinya harus diketahui terlebih dahulu untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas untuk dapat dilakukan analisis kinerja keuangan berdasarkan indikator *Value For Money*. Tahapan selanjutnya yakni mengukur persentase menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Setelah diketahui persentase masing-masing tingkatan, maka dilakukan identifikasi dan analisis hasil pengukuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman beralamat di Jalan KRT. Pringgodingrat No. 13, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata. Dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, maka tugas Dinas Pariwisata adalah membantu Dinas Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pendampingan dari bidang pariwisata. Dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata,

Dinas Pariwisata mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: merumuskan rencana kerja Dinas Pariwisata; merumuskan kebijakan teknis pemerintah di bidang pariwisata; pelaksanaan, pelayanan, pengembangan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pariwisata; evaluasi dan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; melaksanakan pelayanan sekretariat; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021”. Misi Kabupaten Sleman dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaansumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Gambar 1. Logo Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Logo mengambil simbol candi prambanan dan gunung merapi akan bersanding dengan tagline “*The living Culture, Part of Jogja*” terkait dengan tagline tersebut, didapatkan melalui proses pemungutan suara dari peserta FGD. Saat itu, ada beberapa pilihan *tagline* diantaranya *The Living Culture*, *Unique Living Culture* dan *Inspirinc Culture and Nature*. Sekitar 60% peserta FGD memilih *tagline The Living Culture*. Alasan dipilihnya *tagline* berbahasa Inggris adalah agar dapat ditangkap dan dipahami oleh semua kalangan terutama turis mancanegara. Logo dinas pariwisata kabupaten sleman ini dikenalkan kepada khalayak umum oleh kepala dinas yakni Sudarningsih pada upacara peringatan hari jadi Sleman ke-101 pada hari Senin, 15 Mei 2017 namun secara resmi dikenalkan oleh bupati secara resmi pada Resepsi Hari Jadi pada hari Kamis 18 Mei 2017. Logo ini pada awalnya direncanakan untuk promosi wisata di Kabupaten Sleman. Namun atas usulan bupati, logo *branding*

ini akan digunakan pula diseluruh dinas untuk mengangkat potensi Sleman. Dalam logo mengambil dua ikon Sleman yang sudah terkenal di kancah nasional maupun internasional yakni Candi Prambanan dan gunung Merapi. Sementara untuk pemilihan huruf untuk penulisan *tagkine*, karena Sleman merupakan bagian dari DIY maka jenis huruf yang dipilih sama dengan yang dipakai pemerintahan kota DIY (Sleman, 2017). Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
2. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari: Seksi Fasilitas Pariwisata; dan Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata terdiri dari: Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata;
4. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari: Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata; Seksi Promosi Pariwisata; Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis Ekonomis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019

Untuk menilai tingkat ekonomis yakni dengan memperhatikan realisasi dan anggaran belanja pada tahun 2019. Dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja dengan anggaran belanja. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat diperhatikan nominal yang telah dianggarkan dan direalisasikan. Seperti yang tersaji pada Tabel 1. Semakin besar rasio ekonomi yang dihasilkan oleh perhitungan berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dapat menjaga kestabilan dalam upaya untuk meningkatkan nilai ekonomis dalam pengalokasian anggaran dan dalam proses penganggaran dapat memperhatikan harga pasar. Tentunya hal tersebut ditujukan untuk keperluan untuk kemajuan kinerja mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut sangat diupayakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dimasa sulit ditengah pandemi ini untuk bangkit. Menjaga kinerja yang telah diraih baik untuk lebih memperhatikan kondisi dan situasi lebih mendalam.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Langsung	3.306.685.180	3.091.392.401
Belanja Pegawai	2.917.489.068	2.871.011.114
Insentif Pemungutan Retribusi	389.196.112	220.381.287
Belanja Langsung	15.449.344.850	14.724.547.797
Belanja Pegawai	1.090.6224.000	1.076.619.000
Belanja Barang dan Jasa	14.253.720.850	13.543.872.797
Belanja Hibah	105.000.000	104.056.000
Belanja Modal	5.177.207.600	4.547.532.601,94
Belanja Peralatan dan Mesin	766.061.000	759.785.047
Belanja Gedung dan Bangunan	4.362.146.600	3.738.976.791,31
Belanja Aset Tetap Lainnya	49.000.000	48.770.763,63
Jumlah Belanja	23.933.237.630	22.363.472.799,94

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Dengan demikian persentase ekonomis secara umum pada anggaran belanja dapat diperhitungkan dengan:

$$\frac{\text{Rp } 22.363.472.799,94}{\text{Rp } 23.933.237.630} \times 100\% = 93,44\%$$

Persentase ekonomis dari sudut pos belanja tidak langsung secara umum dapat diperhitungkan:

$$\frac{\text{Rp } 3.091.392.401}{\text{Rp } 3.306.685.180} \times 100\% = 93,49\%$$

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai dan insentif pemungutan retribusi daerah. Adapun perhitungan setiap pos tersebut adalah:

Belanja Pegawai

$$\frac{\text{Rp } 2.871.011.114}{\text{Rp } 2.917.489.068} \times 100\% = 98,41\%$$

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

$$\frac{\text{Rp } 220.381.287}{\text{Rp } 389.196.112} \times 100\% = 56,62 \%$$

Tingkat Persentase ekonomis dari sudut belanja langsung secara umum dapat diperhitungkan:

$$\frac{\text{Rp } 14.724.547.797}{\text{Rp } 15.449.344.850} \times 100\% = 93,51 \%$$

Belanja langsung terdiri dari pos belanja langsung pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Adapun perhitungan setiap pos tersebut sebagai berikut:

Belanja Langsung Pegawai

$$\frac{\text{Rp } 1.076.619.000}{\text{Rp } 1.090.624.000} \times 100\% = 98,72 \%$$

Belanja Barang dan Jasa

$$\frac{\text{Rp } 13.543.872.797}{\text{Rp } 14.253.720.850} \times 100\% = 95,02 \%$$

Belanja Hibah

$$\frac{\text{Rp } 104.056.000}{\text{Rp } 105.000.000} \times 100\% = 99,10 \%$$

Persentase ekonomis dari sudut pos Belanja Modal secara umum dapat diperhitungkan:

$$\frac{\text{Rp } 4.547.532.601,94}{\text{Rp } 5.177.207.600} \times 100\% = 87,87 \%$$

Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja aset tetap lainnya. Adapun perhitungan setiap pos belanja modal adalah sebagai berikut:

Belanja Peralatan dan Mesin

$$\frac{\text{Rp } 759.785.047}{\text{Rp } 766.061.000} \times 100\% = 99,18\%$$

Belanja Gedung dan Bangunan

$$\frac{\text{Rp } 3.738.976.791,31}{\text{Rp } 4.362.146.600} \times 100\% = 85,71\%$$

Belanja Aset Tetap Lainnya

$$\frac{\text{Rp } 48.770.763,63}{\text{Rp } 49.000.000} \times 100\% = 99,53\%$$

Apabila hasil perhitungan disajikan dalam tampilan tabel, maka dapat dilihat seperti yang tampak pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, hasil perhitungan tingkat ekonomis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2019 menunjukkan tren yang cukup ekonomis. Persentase berada dalam rentang 85%-100% yakni pada angka 93,44%. Seluruh pos dalam Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan hasil yang cukup ekonomis. Hal ini sudah terbilang baik karena mampu bertahan di kondisi yang sulit karena pandemi Covid-19. Pos Belanja tidak langsung, Belanja langsung dan Belanja modal seluruhnya berada dalam rentangan persentase 85%-100%. Kinerja anggaran dapat dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Setiap pos rinci dalam anggaran dan realisasi belanja seluruhnya dalam kriteria cukup ekonomis karena total belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 23.933.237.630 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp. 22.363.472.799,94. Kriteria ekonomis menurut Abdul Halim (dalam Sulastiningsih & Sulistyowati, 2017) yang ditetapkan yaitu:

- a) Jika nilai rasio kurang dari 65% ($X < 65\%$), menandakan tidak ekonomis.
- b) Jika nilai rasio memperoleh angka 65% sampai dengan 84% ($X = 65-84\%$) berarti kurang ekonomis.
- c) Jika nilai perbandingan memperoleh angka 85% sampai dengan 100% ($X = 85-100\%$), hal ini menunjukkan cukup seimbang untuk ekonomis.
- d) Jika nilai perbandingan memperoleh angka lebih dari 100% ($X = 100\%$), hal ini dinilai ekonomis.

Tabel 2. Hasil perhitungan tingkat ekonomis

Uraian	Persentase (%)	Keterangan
Tingkat Ekonomis	93,44	Cukup Ekonomis
Belanja Pegawai	98,41	Cukup Ekonomis
Insentif Pemungutan Retribusi	56,62	Cukup Ekonomis
Belanja Langsung	95,31	Cukup Ekonomis
Belanja Pegawai	98,72	Cukup Ekonomis
Belanja Barang dan Jasa	95,02	Cukup Ekonomis
Belanja Hibah	99,10	Cukup Ekonomis
Belanja Modal	87,87	Cukup Ekonomis
Belanja Peralatan dan Mesin	99,18	Cukup Ekonomis
Belanja Gedung dan Bangunan	85,71	Cukup Ekonomis
Belanja Aset Tetap Lainnya	99,53	Cukup Ekonomis

Sumber: Data Diolah

1. Tingkat Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. dapat diperhatikan nominal pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan dan direalisasikan seperti yang tersaji pada Tabel 3. Dengan

demikian persentase efisiensi Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pariwisata diperhitungkan:

$$\frac{\text{Rp } 220.381.287}{\text{Rp } 6.138.373.325} \times 100\% = 3,59\%$$

Kriteria efisiensi menurut Mahmudi (dalam Tanan & Duri, 2018) yang ditetapkan yaitu:

- Jika nilai rasio lebih besar dari 30% ($X < 30\%$) berarti tidak efisien.
- Jika nilai rasio memperoleh angka 21% sampai dengan 30% ($X = 21-30\%$), dinilai kurang efisien.
- Jika nilai perbandingan sama dengan 11%-20% ($X = 11\%-20\%$), berarti cukup efisien.
- Jika nilai perbandingan sama dengan 5%-10% ($X = 5\%-10\%$), berarti efisien.

Pendapatan asli daerah yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan 25% dari jumlah PAD Kabupaten Sleman seluruhnya. Diluar nominal tersebut, terdapat penerimaan yang berasal dari dana pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk kegiatan pelayanan. Dalam perhitungan tingkat efisiensi yakni membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Sedangkan belanja yang tidak berhubungan dengan usaha memperoleh pendapatan, dianggarkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan masing-masing persentase penyumbang PAD, program yang diprioritaskan untuk pengembangan, dan *output* rencana kegiatan.

Tabel 3. Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	6.774.783.000	7.069.815.2228
Pendapatan Retribusi Daerah	5.824.783.000	6.138.373.325
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	124.783.000	141.444.325
Retribusi Jasa Usaha, Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.700.000.000	5.996.929.000
Pendapatan Lain-lain		
Bagi Hasil Ratu Boko	950.000.000	9331.441.903
Bagi Hasil Taman Pelangi	900.000.000	897.747.260
	50.000.000	33.694.640

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019

Oleh karena itu, meskipun secara *general* selisih belanja dan pendapatan menunjukkan hasil yang besar, namun tidak dapat dikatakan mengalami defisit karena yang diperhitungkan ialah hanya pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, tidak secara keseluruhan atas pengeluaran belanja yang terjadi. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikatakan bahwa persentase sangat efisiensi PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman adalah sangat efisien karena berada dalam rentang kurang dari 5% yakni 3,59%. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yakni dalam belanja langsung terdapat beberapa kegiatan yang realisasi belanjanya kurang dari target yang ditentukan dikarenakan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, juknis terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) belum terbit, dan rencana anggaran perubahan (Sleman, 2019).

2. Tingkat Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019

Dihitung dengan membandingkan total realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diperhatikan nominal pendapatan yang telah dianggarkan dan direalisasikan. Seperti yang tersaji pada Tabel 4. Dengan demikian persentase efektivitas

secara umum pada Anggaran Dinas Pariwisata tahun 2019 dapat diperhitungkan:

$$\frac{\text{Rp } 7.069.815.228}{\text{Rp } 6.774.783.000} \times 100\% = 104,35\%$$

Sedangkan tingkat persentase efektivitas berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bersumber dari retribusi daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ialah: Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.

$$\frac{\text{Rp } 141.444.325}{\text{Rp } 124.783.000} \times 100\% = 113,35\%$$

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2019

Uraian	Rincian Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Realisasi Pendapatan yang dikelola		7.069.815.228
PAD (Retribusi Daerah)	6.138.373.325	
PAD (Bagi Hasil)	931.441.903	
Realisasi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan		2220.381.287
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	220.381.287	

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019

Perhitungan pos-pos rinci yang terdapat dalam retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah: Fasilitas Kaliurang

$$\frac{\text{Rp } 78.590.000}{\text{Rp } 60.000.000} \times 100\% = 130,98\%$$

Kios Kaliurang

$$\frac{\text{Rp } 62.854.325}{\text{Rp } 64.793.000} \times 100\% = 67,02\%$$

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

$$\frac{\text{Rp } 5.996.929.000}{\text{Rp } 5.700.000.000} \times 100\% = 105,21\%$$

Perhitungan inci dari pos-pos retribusi tempat rekreasi dan olahraga: Kawasan Wisata Kaliurang

$$\frac{\text{Rp } 2.847.786.000}{\text{Rp } 2.500.000.000} \times 100\% = 113,91\%$$

Menara Pandang

$$\frac{\text{Rp } 117.926.000}{\text{Rp } 100.000.000} \times 100\% = 117,93\%$$

Candi-candi

$$\frac{\text{Rp } 1.156.070.000}{\text{Rp } 1.300.000.000} \times 100\% = 88,93\%$$

Kawasan Wisata Kaliadem

$$\frac{\text{Rp } 1.875.147.000}{\text{Rp } 1.800.000.000} \times 100\% = 104,17 \%$$

Tingkat persentase efektivitas yang bersumber dari PAD yang sah lainnya yang terdiri dari Bagi Hasil Ratu Boko dan Bagi Hasil Taman Pelangi dapat diperhitungkan:

Bagi Hasil Ratu Boko

$$\frac{\text{Rp } 897.747.263}{\text{Rp } 900.000.000} \times 100\% = 99,75\%$$

Bagi Hasil Taman Pelangi

$$\frac{\text{Rp } 33.694.640}{\text{Rp } 50.000.000} \times 100\% = 67,39\%$$

Maka secara keseluruhan untuk bagi hasil yang merupakan komponen dari PAD lain yang sah yakni:

$$\frac{\text{Rp } 931.441.903}{\text{Rp } 950.000.000} \times 100\% = 98,05\%$$

Kriteria efektivitas menurut Mahsun (dalam Sudaryo *et al.*, 2017) yang ditetapkan yaitu:

- Jika nilai rasio kurang dari 60% ($X < 60\%$), berarti tidak efektif.
- Jika nilai rasio memperoleh angka 60%-80% ($X = 60-80\%$), berarti kurang efektif.
- Jika nilai rasio memperoleh angka 80%-90% ($X = 80-90\%$), berarti cukup efektifitas.
- Jika nilai rasio memperoleh angka 90%-100% ($X = 90\%-100\%$), berarti rasio tersebut efektif.
- Jika nilai rasio lebih dari 100% ($X > 100\%$), berarti sangat efektif.

Dengan demikian hasil perhitungan dari persentase efektivitas setiap pos dapat dilihat seperti yang tersaji pada Tabel 5. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikatakan bahwa persentase tingkat efektivitas pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman adalah sangat efektif karena berada dalam rentang lebih dari 100% yakni 104,35%.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas

Uraian	Persentase (%)	Keterangan
PAD-Retribusi Daerah	105,58	Sangat Efektif
a. Retribusi jasa Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah	113,35	Sangat Efektif
1) Fasilitas Kaliurang	130,83	Sangat Efektif
2) Kios Kaliurang	97,02	Cukup Efektif
b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	105,21	Sangat Efektif
1) Kawasan Wisata Kaliurang	130,98	Sangat Efektif
2) Menara Pandang	117,93	Sangat Efektif
3) Candi-candi	88,93	Cukup Efektif
4) Kawasan Wisata Kaliadem	104,17	Sangat Efektif
PAD Lainnya yang Sah	98,05	Cukup Efektif
a. Bagi Hasil Ratu Boko	99,75	Cukup Efektif
b. Bagi Hasil Taman Pelangi	67,39	Kurang Efektif
Efektivitas Pendapatan	104,35	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2021

Setiap pos rinci dalam PAD-Retribusi rata-rata masuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan untuk PAD yang sah lainnya pos Bagi Hasil Ratu Boko yakni cukup efektif dan bagian Bagi Hasil Taman Pelangi menunjukkan hasil yang kurang efektif. Kinerja anggaran dapat dinilai efektif apabila realisasi pendapatan lebih besar dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah PAD yang dianggarkan yakni sebesar 6.774.783.000, sedangkan jumlah PAD yang terealisasi yakni sebesar Rp. 7.069.815.228. Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa dari tahun 2018- 2019 PAD mengalami penurunan sebagai dampak dari menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung khususnya wisatawan mancanegara. Tindak lanjut Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman terhadap pendapatan yang turun ialah melakukan refocusing anggaran, rasionalisasi dan penghematan anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dapat menjaga kestabilan dalam rangka upaya untuk meningkatkan nilai efektivitas dalam pengalokasian anggaran. Tentunya hal tersebut ditujukan untuk keperluan dalam kemajuan kinerja mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

KESIMPULAN

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2019 menunjukkan tren yang cukup ekonomis. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dikatakan ekonomis karena dana realisasi yang digunakan lebih kecil dari anggaran yang telah dianggarkan serta organisasinya mampu mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Apabila nilai dari rasio ekonomi semakin kecil, maka kinerja akan semakin baik. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja sangat efisien. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. *put* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman termasuk efisiensi karena mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* se-minimal mungkin, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* yang maksimal.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja sangat efektif. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dikatakan efektif karena proses kegiatan yang dirancang tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Terdapat faktor-faktor yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada keefektifan penerapan dana berdasar kinerja yaitu pelatihan dan tekanan eksternal. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Prasetyo & Nugraheni (2020) yang melaporkan bahwa Disdukcapil Kota Magelang pada tahun 2015 dan 2016 memiliki penyerapan anggaran yang cukup efektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu belum melakukan komparasi terhadap tahun anggaran sebelumnya atau dengan objek yang sejenis dan relevan. Untuk itu bagi penelitian selanjutnya dapat membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan instansi pemerintah lain yang memiliki keterkaitan, memperluas variabel seperti menambah tingkat ketergantungan daerah, metode diluar *Value For Money* seperti Rasio Keuangan dan cakupan wilayah. Bagi Objek penelitian diharapkan memperhatikan kemungkinan tercapainya realisasi pendapatan dengan anggarannya untuk meningkatkan tingkat efektivitas. Melakukan perbandingan dengan penganggaran sebelumnya dan memperhatikan kondisi agar tidak terjadi selisih yang besar antara realisasi dan target yang dianggarkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara disebutkan bahwa dari tahun 2018- 2019 PAD mengalami penurunan sebagai dampak dari menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung khususnya wisatawan mancanegara. Tindak lanjut Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman terhadap pendapatan yang turun ialah melakukan refocusing anggaran, rasionalisasi dan penghematan anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dapat menjaga kestabilan dalam rangka upaya untuk meningkatkan nilai efektivitas dalam pengalokasian anggaran. Tentunya hal tersebut ditujukan untuk keperluan dalam kemajuan kinerja mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

REFERENSI

- Ardila, I., & Putri, ayu anindya. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- BPKAD, B. (2018). *Fungsi dan Aspek Anggaran*. bpkad.banjarkab.go.id
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 82–89. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1942>
- DIY, B. (2019). *Laporan Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019*.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016a). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mahmudi. (2016b). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga Cetakan Pertama*. Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat)*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nainu, R., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2017). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam “Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama” dengan Menggunakan Metode Value for Money pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 158–1166. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18619.2017>
- Nasution, D. A. D. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 1–10.
- Pratama, N. D., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2018). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.23>
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–16.
- Ramadhan, F. N. (2017). *Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat*. 1392141013, 1–15.
- Renyowijoyo, M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi Ketiga*. Mitra Wacana Media.
- Rumiasih, N. ., & Ikmayadi. (2012). Evaluasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dalam Menilai Kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 42–52.
- Ridwan, M., & Anggrawati, A. (2017). Konsep Value for Money: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan ...* <http://103.55.216.56/index.php/assets/article/view/3936>
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Sari, N. C. F. (2014). Prinsip Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 3(2686–438), 1–25.
- Septariani, J. (2018). Penerapan Konsep Value for Money pada Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin. *BALANCE Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 158. <https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1169>
- Sleman, D. P. K. (2017). *Sleman Kini Miliki Logo dan Tagline*.
- Sleman, D. P. K. (2019). *Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019*.
- Sleman, D. P. K. (2020). *Wisata Kabupaten Sleman*. pariwisata.slemankab.go.id
- Sudaryo, Y., Devyanthi, S., & Ayu, S. N. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. CV. Andi Offset.
- Sulastiningsih, & Sulistyowati, I. (2017). Pengukuran Kinerja Berbasis Value For Money Studi pada SMP

- Negeri 2 Banjarnegara. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23(1), 1–13.
<https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.200>
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sundarta, M. I., & Rosita, E. (2013). Analisa Implementasi Basis AkruaI Pada Laporan Keuangan Berbasis Kas Modifikasi Pada Pusat Penelitian Limnologi-LIPI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 19–44.
<http://150.107.142.43/index.php/neraca/article/view/868>
- Suyitno. (2012). *Pengembangan Potensi Kepariwisata di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). 6(September), 91–101.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado. 14(29), 354–3